

RENCANA STRATEGIS

2021-2026

(RENSTRA)

**DINAS PERTANAHAN
DAN PENATAAN RUANG**



KATA PENGANTAR

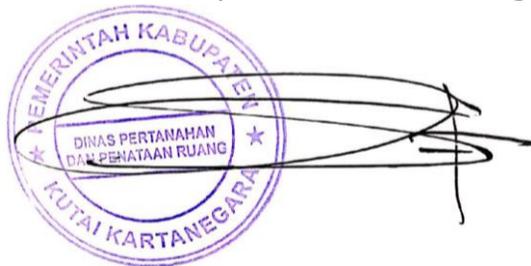
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai dengan memperhitungkan sumberdaya yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara serta tetap memperhatikan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Akhirnya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tenggarong, 17 Juni 2021
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara



SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara	9
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara	20
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kab.Kutaia Kartanegara .	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	41

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Penentuan Isu-isu Strategis.....	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KAB.KUTAI KARTANEGARA	79
BAB VIII PENUTUP	81
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Rencana pembangunan yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan RKPD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka RKPD dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2021- 2026, yaitu; Bapak Drs Edi Damansyah, MSi dan Bapak Rendi Solihin , yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor pada Tanggal 26 Februari Tahun 2021. Penjabaran visi, misi dan program tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025, juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

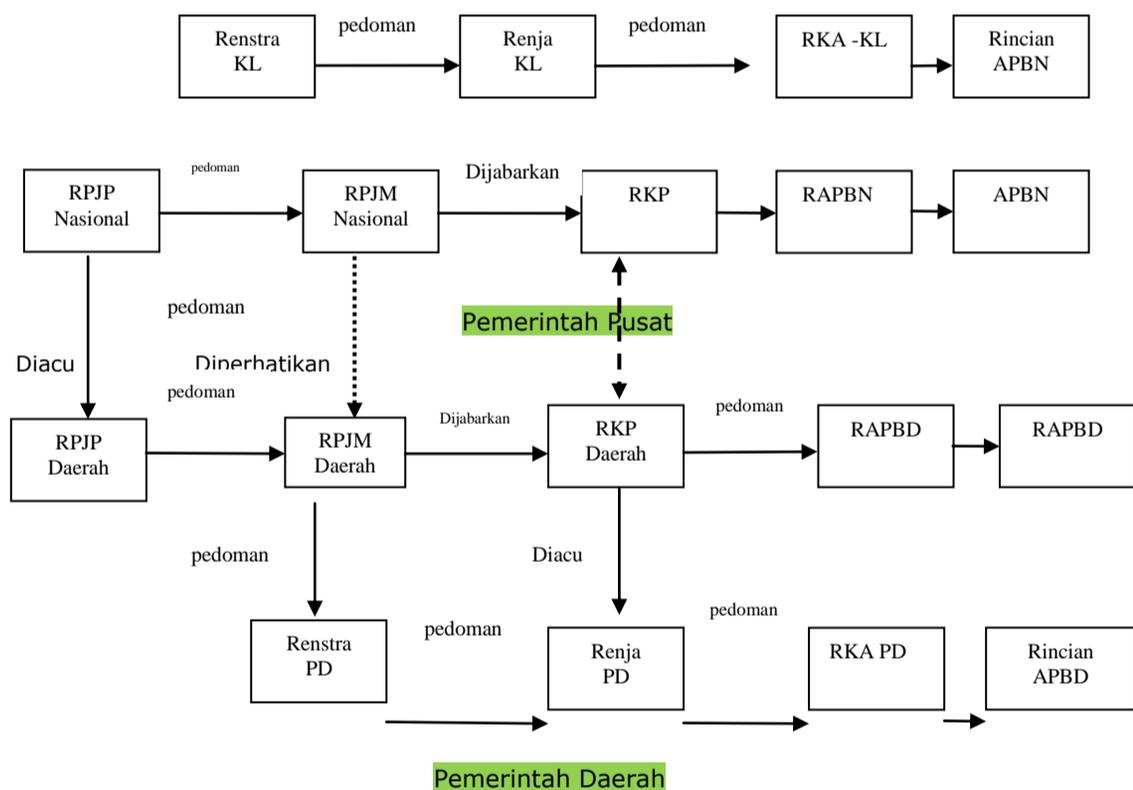
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyempurnaan Rancangan Renstra dilakukan setelah

tersusun perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan dan tata ruang sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar I.I
Bagian Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dengan demikian dokumen Renstra dan RKP Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021.
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033; dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
 25. Renstra Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Ta tahun 2016-2021;
 26. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B.355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tujuan pelaksanaan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 adalah dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penganggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan laporan pelaksanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dasar evaluasi atas

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas Fungsi Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi khususnya dibidang Pertanahan dan Tata Ruang dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, apa saja tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian provinsi Kalimantan Timur. Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai

Kartanegara.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang (tahun 2021-2026).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan Perangkat Daerah, Program lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai indikator kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

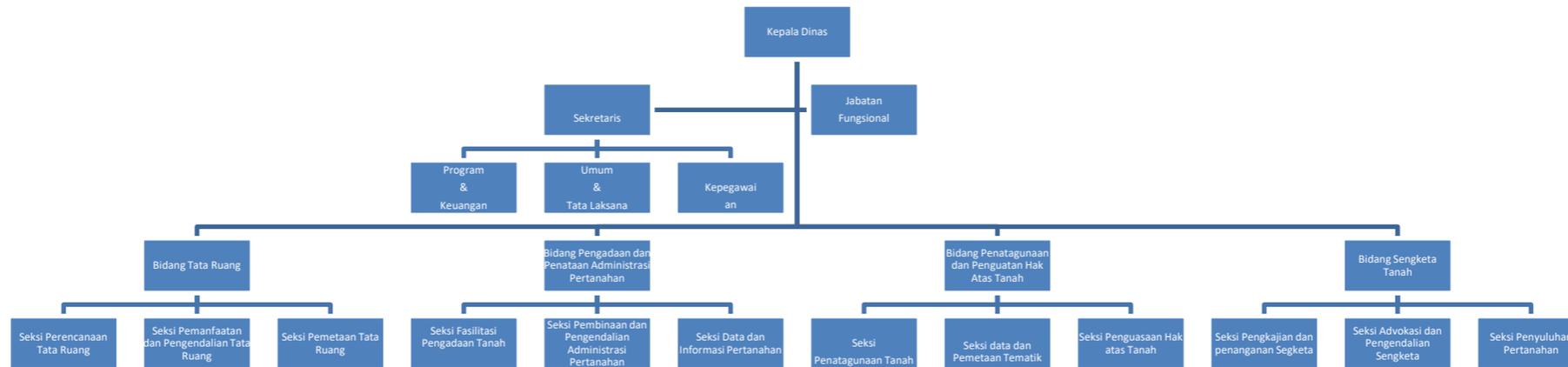
1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Sub Bagian Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - Seksi Pemetaan Tata Ruang
4. Bidang Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan, membawahkan :
 - Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - Seksi Data dan Informasi Pertanahan
5. Bidang Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah, membawahkan :
 - Seksi Penatagunaan Tanah
 - Seksi Data dan Pemetaan Tematik
 - Seksi Penguatan Hak Atas Tanah
6. Bidang Sengketa Tanah, membawahkan :
 - Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan
 - Seksi Penyuluhan Pertanahan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

1. Kondisi Umum Pegawai

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan aparatur dengan disiplin ilmu yang berbeda. Berikut adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah	Persentase (%)
		(orang)	
1.	Aparatur Sipil Negara	74	58,65
2.	Tenaga Harian Lepas (THL)	51	41,36
	Jumlah	125	100

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan

Sesuai dengan Perbub Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pengisian formasi Jabatan Struktural terdiri dari Esselon II,III, dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table 2.2

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kukar berdasarkan jabatan Tahun 2021

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan		
A	Pejabat Struktural				
	Eselon II/b	Kepala Dinas	1	-	1

	Eselon III/a	Sekretaris Dinas	1	-	1
	Eselon III/b	Kepala Bidang	3	1	4
	Eselon IV/a	Kepala Sub. Bagian	1	2	3
	Eselon IV/a	Kepala Seksi	9	3	12
	Eselon IV/a	Kepala Sub Bidang	-	-	-
B	Jabatan Fungsional Tertentu				
	Perencana Muda	-	-	-	-
	Perencana Pertama	-	-	-	-
C	Fungsional Umum				
	Pelaksana	-	26	27	52
Total Jumlah Pegawai / ASN			41	33	74

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

b. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan / pangkat

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 74 orang yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara, terdapat 39,75% yang berstatus golongan II, 52,58 % golongan III, dan 7,71% golongan IV.

Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/b)	1	0	1
Pembina Tk 1 (IV/b)	2	0	2
Pembina (IV/a)	3	0	3
Penata Tk. I (III/d)	9	7	16
Penata (III/c)	5	8	13
Penata Muda Tk.I (III/b)	2	4	6
Penata Muda (III/a)	3	1	4
Pengatur Tk. I (II/d)	7	7	14
Pengatur (II/c)	6	5	11
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4	0	4
Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
Total Jumlah Pegawai / ASN	41	33	74

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata - I lebih mendominasi yaitu sebesar 43.59 %. Selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S3	0	0	0
S2	9	3	12
S1	11	13	26
Diploma IV	1	0	1
Diploma III	0	1	1
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	2	16	37
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
Total Jumlah Pegawai / ASN	41	33	74

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

Sedangkan untuk formasi Tenaga Harian Lepas (THL) yang dimiliki Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tingkat pendidikan Strata I juga paling banyak yaitu sekitar 49,09 %.

Tabel 2.5 : Jumlah Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	1	-	1
S1	12	10	22
Diploma IV	-	-	-
Diploma III	1	1	2
Diploma II	0	0	0
Diploma I	-	-	-

SLTA		17	6	23
SLTP		0	1	1
SD		-	-	-
Total Jumlah THL		31	18	49

Sumber : Sub.Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun jumlah anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dilaksanakan sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan 2021

No	Tahun	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	2020	Rp71.869.929.871,96	Rp49.394.145.009,55
2.	2021	Rp16.584.964.974,00	Rp -
	Total	Rp88.454.894.845,96	Rp49.394.145.009,55

Sumber : Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) DPRD 2020 & 2021

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain :

- Menunjang kegiatan ketatausahaan/administrasi perkantoran;
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terbilang sangat minim. Sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan kebutuhan riil yang ada. Sarana dan Prasarana

sementara yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2017 adalah milik Sekretariat daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebelum Perangkat Daerah ini terbentuk.

Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara :

Tabel 2.6 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Tanah)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.558	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB A)

Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, berupa tanah aset tanah bangunan kantor pemerintah dengan status hak pakai, tahun pengadaan 2005 yang dinilai oleh PT Hutama Karya. Sebelum digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tanah Bangunan ini dimiliki oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD).

Tabel 2.7 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Gedung dan Bangunan)

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1.	Bangunan Gedung Kantor permanen	1600	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
2.	Bangunan Gedung Kantor permanen	3240000	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
4.	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	-	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
5.	Bangunan Lain-lain	88	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

6.	Bangunan Lain-lain	326	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu
7.	Bangunan Lain-lain	200	Jl.Muso Bin Salim No.06 Kel.Melayu

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB C)

Aset sarana tempat kerja di atas, terdiri dari Kantor Dinas seluas 216 M², kantor 2 seluas 259 M², pagar keliling 120 M², pagar Depan 75 M² dan Jalan 1125 M². bangunan lain-lain berupa kontruksi/pembelian bangunan lainnya (rumah gaset), pembuatan taman kantor dan pemasangan paving blok dan teras kantor.

Adapun data perolehan aset peralatan dan mesin lainnya, dapat di rincikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 : Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara (Data Aset Peralatan dan Mesin)

No	Uraian	Satuan	Jumlah
A	Alat-alat Angkutan 102		
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	4
2.	Staion Wagon	Unit	2
3.	Mini Bus	Unit	1
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
4.	Meja Tambahan	Unit	2
5.	Kursi Rapat	Unit	2
6.	Sofa	Unit	4
7.	Meja Kerja Pejabat Ess II	Unit	2
8.	Meja Kerja Pejabat Ess III	Unit	3
9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Unit	4
10.	Kursi Kerja pejabat Ess IV	Unit	9
11.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	45

12.	Meja Biro	Unit	65
13.	Lemari Kayu	Unit	6
14.	Lemari Besi	Unit	11
15.	Lemari Arsip	Unit	7
16.	Filling Besi/Metal	Unit	48
17.	Band Kas	Unit	1
18.	Mesin Penghancur Kertas	Unit	2
19.	Papan Nama Instansi	Unit	2
20.	Moubiler Lainnya	Unit	3
21.	Note Book	Unit	22
22.	Peralatan Personal Komputer	Unit	1
23.	Personal Komputer	Unit	38
24.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	6
25.	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1
26.	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	Unit	1
27.	Hard Disk	Unit	12
28.	Printer	Unit	46
29.	Scanner	Unit	9
30.	Slide Projector	Unit	6
C	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
31.	Global Positioning System	Unit	17
32.	Alat Ukur Metaran	Unit	20
33.	Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan)	Unit	4
34.	Monitor	Unit	1

35.	Tustel	Unit	7
36.	HandyCam	Unit	2
37.	Video Camera dan Recorder	Unit	5
38.	Ploter	Unit	2
39.	Camera Elektronik	Unit	4
40.	CCTV	Unit	3
41.	Theodolt	Unit	1
42.	Kompas	Unit	5
43.	Air Conditioning Unit	Unit	7
44.	AC Split	Unit	6
45.	Tangga Aluminium	Unit	1
46.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Unit	1
47.	Dispenser	Unit	2
48.	Televisi	Unit	3
49.	Lemari Pendingin	Unit	1
50.	Gorden	Pasang	2
51.	Karpet	Roll	1
52.	Tabung Pemadam Kebakaran	Unit	4
53.	Bola Api	Unit	6
54.	Wireless Amplifier	Unit	1

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB B)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun target yang ingin dicapai disesuaikan dengan Indikator kinerja yaitu yang ada pada Dinas

Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara isinya menggambarkan indikator kinerja sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun pencapaian kinerja bagian pertanahan dan bagian Tata Ruang sebelum bergabung menjadi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat dilihat pada table 2.3:

Tabel T-C 2.3: Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target SKPD Tahun	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas lahan bersertifikat					-	-	-	-	-	0,04	0.64	0,22	1,20	0,57	0,04	0.64	0,22	1,20	0,57
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara					n.a	95,83	96	100	100	n.a	69,23	95,83	91,89	100	72,24	99,82	91,89	100	100
3.	Penyelesaian Izin Lokasi					n.a	100	100	100	100	n.a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB					n.a	41,31	41,31	41,31	41,31	n.a	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31	41,31
5.	Keberadaan Perda RTRW (Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang)					n.a	ada	ada	ada	ada	n.a	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Urusan Pertanahan	1.062.502.923	7.698.838.800	14.243.085.160	14.906.255.435	13.500.955.974	879.400.776	6.970.600.850	4.961.163.932	9.759.282.842	12.644.692.814	82,77	90,54	34,83	97,33	93,66	79,83	100
Urusan Tata Ruang	490.295.916,05	500.000.000	20.707.947.650	28.254.962.435	3.250.000.000	360.340.300	387.340.580	8.451.591.416	26.620.290.075	2.804.811.200	73,50	77,46	40,81	99,97	86,30	75,61	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab.Kutai Kartanegara

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal. Untuk menjadi Organisasi Perangkat Daerah yang baik tentunya segala permasalahan yang ada tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tantangan yang sering terjadi salah satunya terkait dengan perencanaan yaitu dengan dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah Daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara harus dengan sigap mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan.

Jika dianalisis permasalahan internal ataupun eksternal yang dihadapi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dapat digunakan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats*). Dalam analisis SWOT, lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weakness* (kelemahan). Sedangkan *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) berada di lingkungan eksternal. Adapun masing-masing kondisi lingkungan dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. *Strength (Kekuatan)*

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman Dan Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah Atau Kerugian Yang Dapat Dinilai Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033.
- Sumber Daya Manusia
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

b. Weakness (Kelemahan)

- Terbatasnya/belum adanya Rencana Tata Ruang rinci (RDTR);
- Konsistensi terhadap perencanaan Penataan Ruang;
- Terbatasnya peta-peta tematik penunjang ke tata ruangan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
- Belum tersedianya sistem informasi pendukung pertanahan dan penataan ruang yang memadai;
- Masih kurangnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat;
- Belum adanya sinkronisasi rencana tata ruang pada wilayah perbatasan;
- Belum terintegrasinya data atau peta terhadap standarisasi nasional (data spasial nasional).

2. Lingkungan Eksternal

a. Opportunity (Peluang)

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Adanya kerjasama Pemkab dengan instansi vertikal dan dengan daerah lain (kabupaten/kota) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/Instansi lain

di luar Pemda yang terkait dengan Pertanahan dan Penatan Ruang;

- Keterbukaan informasi publik (media untuk menyampaikan keluhan masyarakat).

b.Threats (Ancaman)

- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi rencana tata ruang dan pertanahan;
- Belum terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Luas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Belum terpolanya jaringan Infrastruktur dalam pengembangan wilayah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, dan prioritas.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, selain bahwa menggabungkan dua fungsi yang berbeda menjadi satu tupoksi yang selaras memerlukan penyesuaian ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi antara lain :

1. pemanfaatan lahan tidak optimal
2. Belum terpenuhinya kebutuhan data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. Belum terwujudnya arah pembangunan sesuai dengan tata ruang;
4. Permasalahan dalam hal Pembebasan Lahan;
5. Data-data dan informasi pertanahan yang belum terakomodir dengan baik;
6. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah;

7. Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan pelayanan public secara berkualitas;
9. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini kemampuan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelayanan secara berkualitas.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam tabel T-B.35 dibawah ini :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	pemanfaatan lahan tidak optimal	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk Redistribusi Tanah	-Redistribusi Tanah belum terarah dan tepat sasaran -Terbatasnya ketersediaan tanah objek landreform yang berasal dari kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee (pada lahan ex Transmigrasi)
2.	Data dan informasi pendukung yang tidak lengkap	Tidak terpusatnya data mengenai pertanahan dan tata ruang	Sistem pengendalian internal yang lemah
3.	Belum terwujudnya arah pembangunan sesuai dengan tata ruang	Kekuatan hukum atas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang rendah	-Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) -Belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) -Belum adanya Peraturan terkait insentif dan Disentif Pemanfaatan Ruang
4.	Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah	Perlu klarifikasi/ Rekomendasi dari Pihak terkait	Tidak ada tanggapan / Respon lambat dari Pihak Terkait
5.	Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak	Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan	Belum optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan permasalahan pertanahan
6.	Permasalahan dalam hal Pembebasan Lahan	Rencana pembangunan tidak sesuai dengan penyediaan lahan	Kurangnya koordinasi lintas OPD

7.	Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung	Tidak di dukung oleh sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran
8.	Rendahnya kualitas SDM	Kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya bimbingan dan pelatihan tim teknis

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 , Sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran dari visi tersebut sebagai berikut :

- ❖ **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- ❖ **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman Diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang

didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan untuk akronim berarti inovatif, daya saing dan mandiri (Idaman). Kukar Idaman ialah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinegistas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang ditetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai tugasnya membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian beberapa misi pembangunan, di antaranya :

1. *Pencapaian Misi I* : Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Dalam pelaksanaan misi ini, Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah :

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi pertanahan

Sasaran : Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan

2. *Pencapaian Misi IV* : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Dalam pencapaian misi ini Tujuan dan Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran : Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arah Pola Ruang

3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 harus memperhatikan Renstra Kementerian/lembaga terkait. Tujuannya agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sejalan dengan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020 - 2024 adalah :

“ Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan penataan runag yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Adapun arah kebijakan dan strategis Kementrian dapat dilihat pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1 : Arah kebijakan dan strategi kementrian

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementrian
1.	Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang - Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder - Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat eselon III) - Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - <i>Rights Restrictions</i> dan <i>Responsibilities</i> atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T), - Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.
2.	PenyediaanInfrastruktur Informasi Kadastral	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Fit For Purpose Kadaster - Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap - Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementrian
		kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi
3.	Aspek Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Tenureship)	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria, termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat - Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah - Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secara kolaboratif dengan berbagai pihak - Perwujudan Pendaftaran Tanah Kota/Kabupaten Lengkap
4.	Aspek Nilai Tanah (Land Value)	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan penyajian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan kedalam peta bidang tanah (kadaster)
5.	Aspek Penggunaan Tanah (Land Use)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; - Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).
6.	Aspek Pengembangan Pertanahan (Land Development)	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak: Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah; - Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD.
7.	Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak; - Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020

No	Arah Kebijakan	Strategi Kementerian
		<p>tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan prinsip Talent Pool Management ; - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital; - Peningkatan kualitas proses dan output / keluaran administrasi pertanahan; - Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan; - Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi).

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Agraria/BPN dan Tata Ruang Tahun 2021 – 2024

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tentunya harus sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 tidak terlepas dari Keterkaitan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dari sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang spesifik, realistik dan konsisten.

Visi Kaltim Berdaulat 2023 adalah :

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”.

Sedangkan Misi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

sehingga dapat dilakukan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk mensinkronisasikan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan yang ada untuk mencapai tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seiring dengan dilakukannya revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 maka arah kebijakan dan tujuan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara pun berubah. Dalam draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah

“Mewujudkan penyangga IKN yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten, berbasis kawasan andalan dengan

mengembangkan sektor Agro industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa.”

Selanjutnya dalam draft revisi RTRW juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah sebagai berikut :

- a. pengembangan sistem perkotaan;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana;
- c. pemantapan fungsi dan kedudukan Daerah dalam kawasan andalan.
- d. pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian;
- f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya;
- g. pengembangan kegiatan perikanan;
- h. pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan;
- i. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- j. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam;
- k. pengembangan kawasan industri; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan penataan ruang tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk strategi penataan ruang wilayah kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara berfungsi antara lain sebagai dasar untuk menyusun rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten dan menjadi dasar dalam penetapan arahan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Adapun strategi penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi:
 - a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.

- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan bandar udara bertaraf Nasional dan Internasional sebagai penunjang Ibu Kota Negara dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - f. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.

- (3) Pemantapan fungsi dan kedudukan Daerah dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi:
 - a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata;

- c. mengoptimalkan kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (4) Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan strategi meliputi:
- a. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
 - b. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pasca pertambangan;
 - c. mengalokasikan pemanfaatan lahan pascatambang yang disesuaikan dengan potensi lokal; dan
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan;
- (5) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan agromina industri;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
 - f. melakukan tata kelola ulang kawasan perkebunan.
- (6) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensi sejarah yang tinggi dan alam yang khas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;

- b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat; dan
 - e. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas.
 - f. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing;
 - g. mengembangkan usaha ekonomi Kreatif daerah yang berdaya saing.
- (7) Pengembangan kegiatan perikanan dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
- a. mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

- (9) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi:
- a. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan; dan
 - e. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (10) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal; dan
 - b. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (11) Pengembangan kawasan industri dengan strategi pengembangan sektor hilirisasi industri;
- (12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan

- d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dirumuskan kemudian diwujudkan secara keruangan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, yang meliputi rencana sistem perkotaan dan sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana dan sarana. Sedangkan rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam mewujudkan rencana tata ruang tidak terlepas dari dampak maupun kerusakan khususnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, sebagaimana disebut dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program (KRP) pembangunan suatu wilayah dalam hal ini KRP dalam bidang penataan ruang.

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa penyusunan KLHS dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan rencana tata ruang dalam bentuk analisis daya tampung dan daya dukung lingkungan. Hasil analisis kemudian dijadikan dasar bagi perumusan alternatif konsep rencana yang telah mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-O
 - a. Meningkatkan koordinasi perencanaan tata ruang
 - b. Meningkatkan dokumen perencanaan tata ruang skala rinci
 - c. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pertanahan dan penataan ruang.
 - d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui Diklat.
2. Strategi W-O
 - a. Mengoptimalkan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG Tata Ruang dan pertanahan
3. Strategi S-T
 - a. Melakukan sosialisasi rencana Tata Ruang dan Pertanahan
 - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang
 - c. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Pemkab.
4. Strategi W-T
 - a. Perlu adanya peta-peta tematik
 - b. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pertanahan dan Penataan Ruang
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan ruang dan pertanahan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan tersebut lah maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor – faktor eksternal lainnya.

Adapun sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran merupakan salah satu dasar penilaian kinerja sehingga memicu organisasi untuk berupaya se optimal mungkin untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran tabel 4.2 berikut

Tabel TC.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100

			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75

2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	70	75	80	85

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan implementasi dari keinginan kuat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk menciptakan *Value Added* bagi kualitas layanan kepada para stakeholder dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan dan berkelanjutan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan berbagai strategi yang dipilih, agar perwujudan tujuan dan sasaran lebih terarah.

Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka untuk mewujudkan pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C 26 :Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026

VISI (RPJMD)	:	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI (RPJMD)*	:	1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Peningkatan Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan pelayanan, penataan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian administrasi pertanahan
				Meningkatkan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah KelebihanMaksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas pelaporan yang tepat waktu, pelayanan administrasi umum dan mengoptimalkan penggunaan dan anggaran di Sekretariat	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan pelaporan keuangan tepat waktu
				3) Penyelenggaraan Administrasi Barang dan pelaporan BMD tepat waktu

			4) Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Peningkatan Disiplin ASN Perangkat Daerah
			5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			6) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Kantor.
MISI (RPJMD)*	:	2. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	
Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arah Pola Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Melalui Informasi Tata Ruang
			Meningkatkan jumlah produk tata ruang menjadi produk hukum
			Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan tata ruang
			menetapkan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang
			meningkatkan penertiban pelanggaran tata ruang

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD untuk mencapai Sasaran Strategis ditentukanlah program-program pada Rancangan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penyempurnaan Indikator program dan operasionalisasi rumusan indicator.

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
Program pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah		
Program pengembangan Sistem Informasi pertanahan dan Penataan Ruang		
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
	Program Penetapan Tanah Ulayat	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
	Program Penatagunaan Tanah	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang		
Program Pemetaan Tata Ruang		

Uraian Rencana program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Renstra ini disajikan dalam, pada tabel TC 27 sebagaimana terlampir pada laporan ini :

Tabel TC 27 program dan kegiatan dan pendanaan Dinas pertanahan dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	60.33	65		70		75		80		85					

Meningkatnya Pemanfaatan sesuai Arah Kebijakan Ruang						Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase	60.33	65	70	75	80	85						Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara		
	01	03	12																			
	01	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	60.33	65	1,820,000,000	70	2,300,000,000	75	2,300,000,000	80	2,300,000,000	85	2,300,000,000	85	11,020,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
	01	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	0	10	730,000,000	9	500,000,000	11	1,050,000,000	4	900,000,000	4	1,050,000,000	100	4,230,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
	01	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	0	1	150,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
	01	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	0	2	580,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	6	2,080,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 01	0 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berijin dan tidak berijin	Doku men	0	0	-	0	-	1)0 2)1	400,000,0 00	1)1 2)0	250,000,0 00	1)0 2)1	400,000,0 00	1)1 2)2	1,050,0 00,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 01	0 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang sudah mendapatkan sosialisasi	Keca matan	0	2	-	4	200,000,0 00	4	250,000,0 00	4	250,000,0 00	4	250,000,0 00	18	950,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Perse n	0	16.7	485,000,0 00	21.8	600,000,0 00	15.0 4	-	27.2 9	400,000,0 00	19.0 9	-	25	1,485,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 02	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Doku men	0	1	485,000,0 00	1	400,000,0 00	0	-	1	400,000,0 00	0	-	3	1,285,0 00,000	Dinas Perta nahan dan penat	Kab. Kutai Karta negar a

		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 03	0 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	Perse n	0 20	60,000,00 0	20	150,000,0 00	20	150,000,0 00	20	150,000,0 00	20	150,000,0 00	100	660,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Perse n	0 6.87	485,000,0 00	6.87	750,000,0 00	3.75	700,000,0 00	3.77	550,000,0 00	3.75	700,000,0 00	25	3,185,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 04	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) Doku men, 2) Perbu p	0 1) 1 2) 0	200,000,0 00	1) 0 2) 1	200,000,0 00	0	-	0	-	0	-	1) 1 2) 1	400,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 04	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) Berka s, 2) Aplika si,	0 1) 50 2) 1	65,000,00 0	1) 50 2) 0	200,000,0 00	1) 50 2) 0	250,000,0 00	1) 50 2) 1	200,000,0 00	1) 50 2) 0	250,000,0 00	1) 250 2) 1	965,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a

		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 04	0 3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Berkas	0	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	100	750,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		0 1 .	0 3 .	1 2	2. 04	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	20	70,000,000	20	200,000,000	20	300,000,000	20	200,000,000	20	300,000,000	100	1,070,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1 0	0 1 .			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	74	12,179,655,600	75	10,894,855,936	76	11,054,855,936	77	10,894,855,936	78	10,894,855,936	78	55,919,079,344	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1 0	0 1 .	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen	15	15	125,000,000	75	625,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara								

		2	1	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen	10	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	45	375,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	60	41,145,252,260	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan	76	76	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	372	39,895,252,260	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	75,000,000	0	-	1	160,000,000	0	-	0	-	2	235,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	0	0	-	0	-	156	160,000,000	0	-	0	-	156	160,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	0	5	75,000,000	0	-	0	-	0	-	5	75,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	770,879,290	7	755,000,000	7	755,000,000	7	755,000,000	35	3,790,879,290	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	Jumlah Komponen	9	9	35,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	45	175,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45	45	105,000,000	45	105,000,000	45	105,000,000	45	105,000,000	225	525,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kota, k, 3). Porsi		1). 7 2). 120 3). 100 0	210,000,000	1). 35 2). 600 3). 500 0	1,050,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara						

		2	1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggan daan	1) jenis 2) Lem bar	1) 4 2) 36000	1) 4 2) 360 00	60,000,0 00	1) 20 2) 180 000	300,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a								
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disedi akan	Ekse mpla r	2790	279 0	15,000,0 00	279 0	15,000,0 00	279 0	15,000,0 00	279 0	15,000,0 00	139 50	75,000, 000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a		
		2	1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordina si dan konsulta si	Kali	15	15	245,879, 290	15	230,000, 000	15	230,000, 000	15	230,000, 000	75	1,165,8 79,290	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a		
		2	1	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokume n	Doku men	1	1	100,000, 000	1	100,000, 000	1	100,000, 000	1	100,000, 000	5	500,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a		
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tahan Daerah	Bula n	12	12	1,412,2 25,858	12	1,418,3 05,484	12	1,418,3 05,484	12	1,418,305, 484	12	1,418,305, 484	60	7,085,447 ,794	Dinas Perta naha n dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a

		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan dinas	Unit		6	67,500,000	6	67,500,000	6	67,500,000	6	67,500,000	6	67,500,000	30	337,500,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit		6	250,000,000	6	250,000,000	6	250,000,000	6	250,000,000	6	250,000,000	30	1,250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung		1	1,200,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,200,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan								Cakup Pelayanan Pertanahan	Persen	n/a	60		70		80		90		100		100			
	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan							Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang	Persen	75	80		85		90		95		100		100			

							Penana man Modal dan Kemuda han Berusah a																	
		2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persent ase Penanga nan Sengket a tanah garapan yang dilakuk an melalui mediasi	Pers en	75	80	275,000 ,000	85	300,000 ,000	90	300,000 ,000	95	300,000 ,000	100	300,000 ,000	100	1,475,0 00,000	Dinas Perta naha n dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan hasil penyele saian sengket a Tanah Garapan dalam Daerah Kabupat en/Kota	Doku men	3	22	275,000,0 00	23	300,000,0 00	23	300,000,0 00	23	300,000,0 00	23	300,000,0 00	114	1,475,000 ,000	Dinas Perta naha n dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedia nya informasi rencana lahan pemban gunan yg tdk bersengk eta dan	Doku men	1	2	225,000, 000	2	200,000, 000	2	200,000, 000	2	200,00 0,000	2	200,00 0,000	10	1,025,0 00,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a

							jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota																	
		2	1	0	2	0	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	2	20	50,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	104	450,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	65	70	250,000,000	75	350,000,000	80	350,000,000	85	350,000,000	90	350,000,000	90	1,650,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	6	250,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	26	1,650,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dokumen	0	1	250,000,000		-		-		-		-	1	250,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk	Dokumen	-	5	-	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	20	1,400,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

						Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		2	1	0			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan	Persen	81	83	300,000,000	86	600,000,000	90	600,000,000	95	600,000,000	100	600,000,000	100	2,700,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebih an maksimum	Dokumen	0	2	200,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	18	1,800,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.	0	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Doku men	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Doku men	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordina si penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupat en/kota	Doku men	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a

		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.	0	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Dokumen	0	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	9	500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

								Kabupaten/Kota																
		2	1	0	2	0	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2	0	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat	Doku men	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	Doku men	0	0	-	0	-	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	275,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen	52	55	1,120,000,000	60	934,799,664	65	824,799,664	70	834,799,664	75	934,799,664	75	4,649,198,656	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah	Dok ume n	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Perta nahan dan penat aan	Kab. Kutai Karta negar a

							difasilitasi untuk di Sertifikat (Peruntukan Penggunaan)																	
		2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	81	82	50,000,00	83	200,000,00	84	200,000,00	85	200,000,00	86	200,000,00	86	850,000,00	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1	0	2.		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	1	50,000,00	2	200,000,00	2	200,000,00	2	200,000,00	2	200,000,00	9	850,000,00	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah/atau SKPT	Doku men	1	1	50,000,00 0	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	5	450,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	0	2.	0	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Doku men		0	-	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	100,000,0 00	1	400,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	1			PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	Persentase tersedianya Penetaa ngunaan Tanah	Persen	75	76	50,000,00 0	77	300,000,0 00	78	200,000,0 00	79	300,000,0 00	80	200,000,0 00	80	1,050,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
		2	1	1	2.	0	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggun aan Tanah	Dok ume n	0	3	50,000,00 0	1	300,000,0 00	1	200,000,0 00	1	300,000,0 00	1	200,000,0 00	7	1,050,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a

								yang Hampanya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi																
		2	1 0	1 0	2. 0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	0	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	450,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	1 0	1 0	2. 0 1	0 2	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

		2	1	1	2:	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Doku men	0	0	-	1	100,000, 000	0	-	1	100,000, 000	0	-	2	200,000 ,000	Dinas Perta nahan dan penat aan Ruan g	Kab. Kutai Karta negar a
JUMLAH												16,179, 655,600												

BAB VII
KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021.

Perencanaan indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencanan jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcome) tahun 2016-2021, yaitu merupakan realisasi kinerja yang telah dicapai. Tahun 2018-2021 merupakan target kinerja yang direncanakan di tuangkan.

Indikator kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan indikator kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan indikator program yang dilaksanakan sebagaimana pada tabel berikut:

TC.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan, sasaran dan Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan Pelayanan Pertanahan	n/a	60	70	80	90	100	100
2	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten Kota	75	80	85	90	100	100	100
3	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	81	82	83	84	85	86	86
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	n/a	15	30	45	60	75	75
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	65	70	75	80	85	90	90
6	Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah	75	76	77	78	79	80	80
7	Tersedianya tanah Objek landereform yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	81	83	86	90	95	100	100
8	Persentase tersedianya pengelolaan tanah kosong	52	55	60	65	70	75	75
9	Persentase tersedianya penetapan tanah ulayat	n/a	15	30	45	60	75	75
10	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	60.33	65	70	75	80	85	85
11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	60.33	65	70	75	80	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 ini merupakan dokumen penjabaran Rancangan RPJMD dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 dan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-355/BAPP/V.1/065.11/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026, dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan pertanahan dan tata ruang yang lebih terukur dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Rancangan RENSTRA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara guna memenuhi tuntutan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perencanaan Pembangunan dan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjadi pelaksanaan pencapaian target, Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun dengan harapan dapat memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tenggarong, 17 Juni 2021
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Kartanegara



SETIANTO NUGROHO AJI, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100	
			Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90	
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100	
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86	
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75	
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85	
			Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	70	75	80	85

KERTAS KERJA

Identifikasi Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

(disusun berdasarkan kinerja layanan 5 thn terakhir/lalu pada Tabel T-C.23)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	pemanfaatan lahan tidak optimal	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk Redistribusi Tanah	-Redistribusi Tanah belum terarah dan tepat sasaran -Terbatasnya ketersediaan tanah objek landreform yang berasal dari kelebihan tanah maksimum dan tanah absentee (pada lahan ex Transmigrasi)
2.	Data dan informasi pendukung yang tidak lengkap	Tidak terpusatnya data mengenai pertanahan dan tata ruang	Sistem pengendalian internal yang lemah
3.	Belum terwujudnya arah pembangunan sesuai dengan tata ruang	Kekuatan hukum atas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang rendah	-Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) -Belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang(RDTR) -Belum adanya Peraturan terkait insentif dan Disentif Pemanfaatan Ruang
4.	Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung	Tidak di dukung oleh sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran
5.	Rendahnya kualitas SDM	Kualitas SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya bimbingan dan pelatihan tim teknis

KERTAS KERJA

PERNYATAAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan ketersediaan lahan pembangunan dibawah 5 Ha (skala kecil) dan Tanah Obyek Landreform (TOL) untuk redistribusi dan perencanaan penggunaan tanah

Meningkatkan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah kab. Kukar

**MATRIKS PENJABARAN VISI MISI KUKAR IDAMAN, DAN TUGAS KEPALA PERANGKAT DAERAH UNTUK 7 HARI KE DEPAN DALAM RANGKA PERSIAPAN
PENYUSUNAN RPJMD KUTAI KARTANEGARA 2021-2026**

Visi	Misi	Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	No	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung	
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"	1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;	1 Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	menyiapkan data kondisi jaringan internet sampai di level desa dan kelurahan		
					2	inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan aplikasi pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi di setiap Perangkat Daerah		
					3	menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan berbasis digital		
					4	mempersiapkan rancangan masterplan pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026		
				Disdukcapil	1	desain penguatan penyediaan data kependudukan hingga ke tingkat RT		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Analisis kebijakan penguatan kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi		
				Sekretariat Kabupaten	2	Evaluasi dan penguatan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan		
			2 Program Aparatur Negara Bahagia	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif.Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	mengkaji peluang pembentukan Koperasi ASN	
					2	mendesain pembentukan koperasi ASN bersama dengan		
		Dinas Koperasi dan UKM			1	pendampingan pembentukan kelembagaan koperasi ASN yang produktif sesuai dengan potensi usaha		
			3 Program Kukar Bebaya	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk melepas ego sectoral dan ego kewilayahan dengan memperluas jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, agar terbangun suatu pola pembangunan terintegrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam jangka panjang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Inventarisasi kebutuhan pembiayaan pemberian BPJS bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	identifikasi kawasan perdesaan potensial berbasis komoditas unggulan	
						2	merumuskan alur proses kerjasama antar desa dalam mendukung pembentukan kawasan perdesaan	
					Sekretariat Kabupaten	1	identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan luar negeri yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah	
					Seluruh Perangkat Daerah	1	menyusun desain kerjasama kelembagaan antara perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung kinerja perangkat daerah	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Revitalisasi peran forum TJSP dalam proses pembangunan daerah	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengkaji regulasi pelaksanaan pembangunan desa berbasis RT	
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	merancang pembentukan dan menyusun desain peran dan fungsi gugus tugas pendamping desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dan kinerja pembangunan desa	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	menyusun instrumen sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan desa	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Menyiapkan data profil potensi investasi daerah yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam publikasi digital	
				g. Membangun komunikasi intensif dengan dunia usaha dalam meningkatkan investasi daerah				

Visi	Misi	Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	No	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung
					2	Mempersiapkan potensi investasi sektoral dalam bentuk rencana kegiatan yang dilaksanakan melalui sumber pembiayaan non pemerintah	
	2 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	4 Program 1.000 Guru Sarjana	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa GURU yang belum mencapai pendidikan standard S1 ditambah dengan Beasiswa Bagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Mengidentifikasi dan inventarisasi calon penerima Beasiswa dari guru ASN dan non ASN.	
				2	Menyusun instrumen seleksi beasiswa penduduk lokal potensial yang akan dijadikan sebagai guru di daerah terpencil.		
		5 Program KUKAR BERKAH	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan alokasi anggaran 100 Juta Rupiah per Pesantren.	Sekretariat Kabupaten	1	Inventarisasi jumlah pesantren di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tingkat dasar, menengah dan atas.	
				2	Menyusun regulasi draft Peraturan Bupati tentang pengembangan kualitas pendidikan melalui penguatan pesantren-pesantren.		
				3	Mengkaji pola pemberian hibah kepada pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan		
		6 Program Beasiswa KUKAR IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/MAHASISWI Kukar untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/ perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah(regular dan stimulant), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pasantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswiSD/SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Menyusun draft regulasi bantuan stimulan bagi 3.000 jenjang SD/SMP, khususnya bagi anak didik yang termasuk kategori miskin, dengan target mengurangi angka putus sekolah.	
				Sekretariat Kabupaten	1	Menyusun draft regulasi beasiswa dengan perikatan dan non perikatan (stimulan), yang mengatur tata cara pemberian beasiswa hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan beasiswa	
		7 Program Keluarga Peduli Kesehatan	a)Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan, yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahanserta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah. b)Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting dibawah target nasional yakni dibawah 14% dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera(gratis BPJS). c)Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID 19, dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, non pemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.	Dinas Kesehatan	1	Identifikasi dan evaluasi indeks keluarga sehat Kabupaten Kutai Kartanegara	
				2	Inventarisasi kondisi fasilitas kesehatan, dan menyusun titik-titik strategis pembangunan dan rehabilitasi puskesmas selama lima tahun perencanaan		
				3	Merumuskan desain teknis rencana pembangunan RSUD Muara Badak		
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1	Identifikasi kondisi existing kinerja posyandu di setiap desa/kelurahan		
				2	menyusun desain penguatan posyandu.		
	Dinas Kesehatan			1	Evaluasi pelaksanaan RAGAPANTAS, dan penyusunan desain penguatan RAGAPANTAS.		
	2			Menyusun draft kebijakan pelaksanaan BPJS pada keluarga Prasejahtera			
	Dinas Komunikasi dan Informatika			1	Mendesain aplikasi yang mendukung kebijakan pemberian BPJS bagi warga pra sejahtera		
	Dinas Kesehatan	1	Mendesain pencegahan COVID-19 berbasis Desa/Kelurahan, yang selanjutnya diintegrasikan dengan pembentukan desa/kel percontohan yang telah menerapkan pola hidup sehat berbasis masyarakat, komunitas dan keluarga.				
	8 Program Kukar Siap Kerja	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja,denganmembangun dan memperkuatPusat Pelatihan Tenaga Kerjaatau Vokasidi setiap ZONA wilayah (Hulu, Tengah, Pesisir) hingga fasilitasi akses kelapangankerja(Job Market)dan kesempatan berusaha(entrepreneurship), dengan target pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Menetapkan alternatif lokasi strategis pembangunan Pusat Pelatihan Kerja di masing-masing zona wilayah		
				2	Merumuskan pola kerjasama penyediaan tenaga kerja dengan dunia usaha sebagai dukungan dalam penurunan tingkat pengangguran dan penguatan tenaga kerja lokal.		

Visi	Misi	Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	No	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung
					3	Identifikasi kebutuhan vokasi sesuai dengan pasar kerja	
		9 Program Kukar Berbudaya	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kutai Kartanegara, dengan menetapkan Tenggarong sebagai Kota Warisan Budaya, dengan menonjolkan kesan Tenggarong Sebagai Kota Sejarah dan Budaya yang Ramah dan Modern.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Identifikasi dan review dokumen perencanaan pengembangan kecamatan Tenggarong	
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Mengidentifikasi Rencana Revitalisasi Pasar Tangga Arung	
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Menginventarisir data pusat-pusat dan potensi budaya di Kutai Kartanegara berdasarkan Kecamatan.	
		10 Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan, yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah	Sekretariat Kabupaten	1	Review Peraturan Bupati tentang Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	
					2	Menginventarisir rumah-rumah ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Mendesain draft regulasi pengembangan muatan lokal (GEMA) untuk SD dan SMP.	
		11 Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah, dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utamanya pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin (jomplo, anak-anak dan disabilitas), kedua program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki. RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan ini dijadikan sebagai simpul sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Salah satu kegiatan strategis RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan adalah Bedah Rumah minimal sebanyak 500 rumah pertahun, Memberikan Jaminan Sosial bagi 3.000 masyarakat miskin dan Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Pertahun yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Menuntaskan penyusunan Rumah Besar Kemiskinan	
				Dinas Sosial	1	Menyusun desain pelaksanaan jaminan sosial (penduduk miskin non produktif) berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Menyusun konsep pelaksanaan Bedah Rumah dan Sanitasi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.	
				Dinas Koperasi dan UKM	1	Menyusun pola pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan dan berbasis teknologi informasi	
3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;	12 Program pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastuktur wilayah (jalan dan angkutan umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUM Desa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Perikanan dan Kelautan	1	Mendesain pengembangan komoditas unggulan berbasis potensi wilayah dan kawasan	
				Dinas Koperasi dan UKM	1	Mengidentifikasi potensi dan evaluasi pembentukan unit usaha koperasi di bidang pertanian dalam arti luas	
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengidentifikasi potensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan unit usaha BUM Desa di bidang pertanian dalam arti luas	
				Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan	1	Menginventarisasi data kebutuhan pembangunan embung/check dam dan jalan produksi sesuai potensi kawasan	
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Inventarisasi lobang pasca tambang di wilayah pertanian	
				Dinas Perikanan dan Kelautan	1	Mendesain pola pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya melalui penguatan sarana prasarana produksi yang sejalan dengan kebijakan nasional	
				Sekretariat Kabupaten	1	Mengkaji peluang pembentukan Perusda dengan unit usaha pertanian di Kutai Kartanegara	

Visi	Misi	Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	No	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah	13	Program Hilirisasi Produk Pertanian Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kukar. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Indutsri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Dengan kegiatan prioritas membangun 3 Sentra IKM di wilayah Kutai Kartanegara.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Mengkaji desain manajemen pengelolaan sentra IKM	
					2	Mengidentifikasi potensi pengembangan industri berdasarkan produksi komoditi unggulan daerah	
		14	Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mendorong industri pariwisata menggeliat di bumi Kutai Kartanegara, dengan mengusung konsep pertunjukan sebagai roh pariwisata Kukar, yang didukung dengan penyediaan destinasi wisata yang memadai, mengkolaborasi seni, budaya dan potensi ekonomi wilayah, dengan melakukan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional, serta mendorong inovasi sector perhotelan dan pusat-pusat kuliner sebagai daya tarik wisata Kutai Kartanegara. Dengan kegiatan prioritas menyelenggarakan 100 festival seni dan budaya skala kabupaten/kecamatan.	Dinas Pariwisata	1	Identifikasi dan mendesain industri pariwisata berbasis potensi destinasi dan festival pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan Pemerintah Desa.	
		15	Program Usaha Kecil IDAMAN Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitas Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (<i>e-commerce / market place</i>).	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Menyusun pola pengembangan pemasaran produk UMKM melalui <i>e-commerce / market place</i> dan menggali peluang kerjasama dengan perusahaan <i>start-up</i> .	
				Dinas Koperasi dan UKM	1	Menyusun desain pembentukan Klinik UMKM di Kecamatan	
					2	Menyusun draft kerjasama fasilitas permodalan melalui lembaga Bank dan non Bank.	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Mengidentifikasi kekuatan jangkauan layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	
		16	Program Kukar Kreatif IDAMAN Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan ruang kreatif bagi muda-mudi millenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif, dengan menetapkan dan memfasilitasi pekan kreatif daerah minimal per 3 bulan yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif kukar, dengan memprioritas pada komoditi kerajinan, video, film, music dan seni pertunjukan.	Dinas Pariwisata	1	Menyusun desain kemitraan antara pemerintah daerah dan komunitas kreatif, dalam penyelenggaraan pekan kreatifitas daerah	
		17	Program Pematapan Konektivitas Wilayah Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi, informasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien				
			a)Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung kecamatan hingga ke desa dan ke pusat-pusat produksi.Dengan target meningkatkan jalan kabupaten mantap sampai dengan 80%, dan Pembangunan dan Peningkatan jalan desa/kecamatan sepanjang 50Km pertahun.	Dinas Pekerjaan Umum	1	Menyediakan database jaringan jalan dan rencana pembangunan jalan berdasarkan sumber pembiayaan APBD/DAK/BANKEU	
					2	Menyusun draft pedoman pelaksanaan pekerjaan insfrastruktur sederhana di kecamatan	
			b)Membangun dan memperkuat jaringan internet bagi kelancaran komunikasi dan informasi, dengan menargetkan Kutai Kartanegara tanpa blank spot.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Mengidentifikasi dan menyusun alternatif penyediaan jaringan internet di setiap desa yang belum memiliki akses internet	
		18	Program Fasilitas Perumahan Rakyat Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi kepemilikan rumah murah berkualitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dengan subsidi DP hingga 0%.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Menyediakan desain penyediaan rumah murah kerjasama antara Pemerintah, Pengembang Perumahan dan Bank.	

Visi	Misi	Program Dedikasi	Batasan Pengertian	Perangkat Daerah Utama	No	Tugas (7 Hari)	Perangkat Daerah Pendukung
		19 Program Air Bersih Desa	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUM Desa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Mengidentifikasi daerah-daerah yang belum memiliki layanan air bersih yang tidak dapat dilayani oleh PDAM	
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	Menyusun konsep pengembangan BUM Desa dengan Unit Usaha Pelayanan Air Bersih	
		20 Program Terang Kampongku	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi energy ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, target 17 Desa Terpencil/Remote Area.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Mengkaji kewenangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penguatan sarana dan prasarana kelistrikan desa.	
					2	Menyusun desain pendampingan Desa melalui BUM Desa Kelistrikan	
	5 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	21 Program Desa Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (BioVillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Mengkaji Penerapan desa Ramah Lingkungan (BioVillage)	
					2	Menyusun Desain/Draft Regulasi Penerapan Desa Ramah Lingkungan dalam Penerapan	
		22 Program Kukar Peduli Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Menyiapkan dokumen pendukung pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah Kutai Kartanegara	
					2	Mempersiapkan desain pengelolaan persampahan di wilayah Kutai Kartanegara	
		23 Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Pengembangan database amdal terintegrasi dan evaluasi yang transparan dan berbasis teknologi informasi	
					2	Mengkoordinasikan seluruh perusahaan pertambangan batu bara, migas dan perkebunan agar menyiapkan program penanaman pohon per tahun dan tanaman lain potensial untuk pengembangan pertanian	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Cakupan Pelayanan Pertanahan	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	80	85	90	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	70	75	80	85	90
			Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	83	86	90	95	100
			Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	82	83	84	85	86
			Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	55	60	65	70	75
2	Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	65	70	75	80	85
		Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahan Pola Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	70	75	80	85

KERTAS KERJA

Tabel T-C. 26

VISI (RPJMD)	:	“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI (RPJMD)*	:	1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan		Meningkatnya penataan, penguasaan dan pemanfaatan pertanahan	Peningkatan Penataan dan Pemanfaatan Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan pelayanan, penataan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian administrasi pertanahan
				Meningkatkan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah KelebihanMaksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas pelaporan yang tepat waktu, pelayanan administrasi umum dan mengoptimalkan penggunaan dan anggaran di	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan danpelaporan keuangan tepat waktu
				3) Penyelenggaraan Administrasi Barang dan pelaporan BMD tepat waktu
				4) Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal serta Peningkatan Disiplin ASN Perangkat Daerah
				5) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
				6) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Pemutakhiran Peralatan Kantor.
MISI (RPJMD)*	:	2. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang produktif dan berkelanjutan		Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arah dan Pola Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Melalui Informasi Tata Ruang	Meningkatkan jumlah produk tata ruang menjadi produk hukum
				Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan tata ruang menetapkan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang
				meningkatkan penertiban pelanggaran tata ruang

KERTAS KERJA

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang produktif dan berkelanjutan				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persen	60.33	65		70			75			80			85						
	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang			Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65		70			75			80			85						
		01.	03.	12		PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65	1,820,000,000	70	2,300,000,000	75	2,300,000,000	80	2,300,000,000	85	2,300,000,000	85	11,020,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		01.	03.	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persen	0	10	730,000,000	9	500,000,000	11	1,050,000,000	4	900,000,000	4	1,050,000,000	100	4,230,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		01.	03.	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	Perda	0	1	150,000,000	0	-	0	0	-	0	-	1	150,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		01.	03.	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati	Perbup	0	2	580,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	6	2,080,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penataan Ruang	1)Jumlah Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah Penetapan Kebijakan terkait bangunan berjinj dan tidak berjinj	Dokumen	0	0	-	0	-	1) 0 2) 1	400,000,000	1) 1 2) 0	250,000,000	1) 0 2) 1	400,000,000	1) 1 2) 2	1,050,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah kecamatan yang sudah mendapatkan sosialisasi	Kecamatan	0	2	-	4	200,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	18	950,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persen	0	16.77	485,000,000	21.81	600,000,000	15.04	-	27.29	400,000,000	19.09	-	25	1,485,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis	Dokumen	0	1	485,000,000	1	400,000,000	0	-	1	400,000,000	0	-	3	1,285,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Komunitas/Kelompok	Komunitas/ Kelompok	0	0	-	1	200,000,000	0	-	0	-	0	-	1	200,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	0	4.89	120,000,000	5.03	450,000,000	5.03	550,000,000	5.03	450,000,000	5.03	550,000,000	25	2,120,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1) Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan, 2) Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang, 3) Jumlah kelurahan/desa yang melakukan konsultasi/supervisi	1) Berkas, 2) Dokumen, 3) Kelurahan/ Desa	80	1) 100 2) 0 3) 0	60,000,000	1) 150 2) 20 3) 5	300,000,000	1) 150 2) 20 3) 5	400,000,000	1) 150 2) 20 3) 5	300,000,000	1) 150 2) 20 3) 5	400,000,000	1) 100 2) 80 3) 20	1,460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini	Persen	0	20	60,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	100	660,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persen	0	6.87	485,000,000	6.87	750,000,000	3.75	700,000,000	3.77	550,000,000	3.75	700,000,000	25	3,185,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah Materi Teknis 2) Jumlah peraturan bupati tentang mengenai insentif dan disinsentif	1) Dokumen, 2) Perbup	0	1) 1 2) 0	200,000,000	1) 0 2) 1	200,000,000	0	-	0	-	0	-	1) 1 2) 1	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1) Jumlah pelanggaran yang teridentifikasi 2) Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang	1) Berkas, 2) Aplikasi,	0	1) 50 2) 1	65,000,000	1) 50 2) 0	200,000,000	1) 50 2) 0	250,000,000	1) 50 2) 1	200,000,000	1) 50 2) 0	250,000,000	1) 250 2) 1	965,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		01.	03.	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang ditertibkan	Berkas	0	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	20	150,000,000	100	750,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		01.	03.	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	0	20	70,000,000	20	200,000,000	20	300,000,000	20	200,000,000	20	300,000,000	100	1,070,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	74	12,179,655,600	75	10,894,855,936	76	11,054,855,936	77	10,894,855,936	78	10,894,855,936	78	55,919,079,344	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen	15	15	125,000,000	15	125,000,000	15	125,000,000	15	125,000,000	15	125,000,000	75	625,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah dokumen	10	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	10	75,000,000	45	375,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	12	8,229,050,452	60	41,145,252,260	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan	76	76	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	74	7,979,050,452.00	372	39,895,252,260	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	2	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	10	1,250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	2	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	75,000,000	0	-	1	160,000,000	0	-	0	-	2	235,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	0	-	-	0	-	156	160,000,000	0	-	0	-	156	160,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data administrasi kepegawaian	Dokumen	0	5	75,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	5	75,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	770,879,290	7	755,000,000	7	755,000,000	7	755,000,000	7	755,000,000	35	3,790,879,290	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	Jumlah Komponen	9	9	35,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	9	35,000,000	45	175,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45	45	105,000,000	45	105,000,000	45	105,000,000	45	105,000,000	45	105,000,000	225	525,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000	1). 7 2). 1200 3). 1000	210,000,000	1). 7 2). 1200 3). 1000	210,000,000	1). 7 2). 1200 3). 1000	210,000,000	1). 7 2). 1200 3). 1000	210,000,000	1). 7 2). 1200 3). 1000	210,000,000	1). 35 2). 6000 3). 5000	1,050,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000	1) 4 2) 36000	60,000,000	1) 4 2) 36000	60,000,000	1) 4 2) 36000	60,000,000	1) 4 2) 36000	60,000,000	1) 4 2) 36000	60,000,000	1) 20 2) 180000	300,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	2790	2790	15,000,000	2790	15,000,000	2790	15,000,000	2790	15,000,000	2790	15,000,000	13950	75,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2	10	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	15	15	245,879,290	15	15	230,000,000	15	15	230,000,000	15	15	230,000,000	15	15	230,000,000	75	1,165,879,290	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	1	100,000,000	1	1	100,000,000	1	1	100,000,000	1	1	100,000,000	1	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1,412,225,858	12	12	1,418,305,484	12	12	1,418,305,484	12	12	1,418,305,484	12	12	1,418,305,484	60	7,085,447,794	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5	5	215,000,000	5	5	215,000,000	5	5	215,000,000	5	5	215,000,000	5	5	215,000,000	25	1,075,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8	1) 51 2) 8	1,197,225,858	1) 51 2) 8	1,203,305,484	1) 51 2) 8	1,203,305,484	1) 51 2) 8	1,203,305,484	1) 51 2) 8	1,203,305,484	1) 255 2) 40	1,203,305,484	1) 255 2) 40	6,010,447,794	255	6,010,447,794	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	13	13	1,517,500,000	12	12	317,500,000	12	12	317,500,000	12	12	317,500,000	12	12	317,500,000	61	2,787,500,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan dinas	Unit	6	6	67,500,000	6	6	67,500,000	6	6	67,500,000	6	6	67,500,000	6	6	67,500,000	30	337,500,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	6	6	250,000,000	6	6	250,000,000	6	6	250,000,000	6	6	250,000,000	6	6	250,000,000	30	1,250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	01.	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	1	1	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,200,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
Terwujudnya tertib administrasi pertanahan								Cakup Pelayanan Pertanahan	Persen	n/a	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya penataan, pengusahaan, dan pemanfaatan pertanahan							Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
								Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	65	70	75	80	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
								Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke masyarakat	Persen	81	83	86	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
								Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	81	82	83	84	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86		
								Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	52	55	60	65	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persen	n/a	15	60,000,000	30	100,000,000	45	100,000,000	60	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	460,000,000	75	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dokumen	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	75	80	275,000,000	85	300,000,000	90	300,000,000	95	300,000,000	100	300,000,000	100	1,475,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	22	275,000,000	23	300,000,000	23	300,000,000	23	300,000,000	23	300,000,000	114	1,475,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	04	2.01	01	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Tersedianya informasi rencana lahan pembangunan yg tdk bersengketa dan jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	Dokumen	1	2	225,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	10	1,025,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	2	20	50,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	21	100,000,000	104	450,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	65	70	250,000,000	75	350,000,000	80	350,000,000	85	350,000,000	90	350,000,000	90	1,650,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	6	250,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	26	1,650,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang ditetapkan Penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Dokumen	0	1	250,000,000		-		-		-		-	1	250,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit/Lokasi	-	-	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	5	350,000,000	20	1,400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	Persen	81	83	300,000,000	86	600,000,000	90	600,000,000	95	600,000,000	100	600,000,000	100	2,700,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	Dokumen	0	2	200,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	18	1,800,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Dokumen	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu daerah Kabupaten/kota	Dokumen	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	9	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.02	01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	06	2.02	02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen	n/a	15	75,000,000	30	200,000,000	45	250,000,000	60	300,000,000	75	300,000,000	75	1,125,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	Dokumen	0	1	75,000,000	2	200,000,000	3	250,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	12	1,125,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dokumen	0	1	75,000,000	1	100,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	450,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhkan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhkan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah laporan hasil kegiatan Penetapan tanah ulayat	Dokumen	0	0	-	0	-	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	275,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen	52	55	1,120,000,000	60	934,799,664	65	824,799,664	70	834,799,664	75	934,799,664	75	4,649,198,656	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong	Dokumen	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	0	1	1,060,000,000	2	834,799,664	2	724,799,664	2	734,799,664	2	834,799,664	9	4,189,198,656	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventarisasi tanah kosong	Dokumen	0	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	460,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen, 2) Jumlah Tanah Aset Pemda yang difasilitasi untuk di Sertifikat (Perumukan Penggunaan)	1) Dokumen 2) Lokasi	0		1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	1,000,000,000	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	734,799,664	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	624,799,664	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	634,799,664	1) 1 Dokumen 2) 100 Lokasi	734,799,664	1) 5 Dokumen 2) 500 Lokasi	3,729,198,656	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara				
		2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	81	82	50,000,000		83	200,000,000		84	200,000,000		85	200,000,000		86	850,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara			
		2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	1	50,000,000		2	200,000,000		2	200,000,000		2	200,000,000		2	200,000,000	9	850,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1	1	50,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000	5	450,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen		0	-			1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara
		2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persen	75	76	50,000,000		77	300,000,000		78	200,000,000		79	300,000,000		80	200,000,000	80	1,050,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	0	3	50,000,000		1	300,000,000		1	200,000,000		1	300,000,000		1	200,000,000	7	1,050,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	0	1	50,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000	5	450,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	10	2.01	02	Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	0	0	-		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000		1	100,000,000	4	400,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
		2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota	Dokumen	0	0	-		1	100,000,000		0	-		1	100,000,000		0	-	2	200,000,000	Dinas Pertanahan dan penataan Ruang	Kab. Kutai Kartanegara	
JUMLAH												16,179,655,600		16,179,655,600		16,179,655,600		16,179,655,600		16,179,655,600		16,179,655,600							

KERTAS KERJA

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Tujuan, sasaran dan Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan Pelayanan Pertanahan	n/a	60	70	80	90	100	100
2	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten Kota	75	80	85	90	100	100	100
3	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	81	82	83	84	85	86	86
4	Presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan denga luas izin lokasi yang diterbitkan	n/a	15	30	45	60	75	75
5	Presentasi penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	65	70	75	80	85	90	90
6	Presentase tersedianya Penatagunaan Tanah	75	76	77	78	79	80	80
7	Tersedianya tanah Objek landereform yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	81	83	86	90	95	100	100
8	Persentase tersedianya pengelolaan tanah kosong	52	55	60	65	70	75	75
9	Persentase tersedianya penetapan tanah ulayat	n/a	15	30	45	60	75	75
10	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	60.33	65	70	75	80	85	85
11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	60.33	65	70	75	80	85	85

Tabel diisi dengan indikator kinerja tujuan & sasaran (sesuai bab 4 Renstra PD), dan indicator kinerja program & kegiatan (sesuai bab 6 Renstra PD).